



**POLITISASI AGAMA DAN PENGARUH NEGATIFNYA TERHADAP
POLITIK SEBAGAI RUANG 'DI-ANTARA' MANUSIA MENURUT
HANNAH ARENDT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

Oleh

AVENTINUS DARMAWAN HADUT

NPM: 21.75.7011

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

2025

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

- 1. Nama : Aventinus Darmawan Hadut
- 2. NPM : 21.75.7011
- 3. Judul Skripsi : Politisasi Agama dan Pengaruh Negatifnya terhadap Politik sebagai Ruang 'di-antara' Manusia

4. Pembimbing:

- 1. Dr. Yosef Keladu :
(Penanggung Jawab)
- 2. Dr. Bernardus Subang Hayong :
- 3. Eugenius Besli, S.Ak., M.Ak :

5. Tanggal diterima : 12 April 2024

6. Mengesahkan

Wakil Rektor I


Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui

Rektor IFTK Ledalero


Dr. Otto Gusti N. Madung

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian dari
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada
13 April 2025

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO



Rektor,

[Handwritten Signature]
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:

1. Dr. Yosef Keladu : *[Handwritten Signature]*
2. Dr. Bernardus Subang Hayong : *[Handwritten Signature]*
3. Eugenius Besli, S.Ak., M.Ak : *[Handwritten Signature]*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aventinus Darmawan Hadut

NPM : 21.75.7011

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis, yakni pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 13 April 2025

Yang Menyatakan



Aventinus Darmawan Hadut

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aventinus Darmawan Hadut

NPM : 21.75.7011

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: "Urgensi Pendidikan Multikultural di Tengah Persoalan Radikalisme Islam di Indonesia" Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Ledalero, Maumere

Pada tanggal: 13 April 2025

Yang menyatakan



Aventinus Darmawan Hadut

KATA PENGANTAR

Kontestasi perpolitikan Indonesia cenderung diwarnai dengan politisasi agama. Politisasi agama ini sangat nampak menjelang pemilihan umum. Unsur-unsur keagamaan diangkat dan dipakai untuk menimbulkan kesan dan citra politik yang dianggap cocok dari sudut pandang agama. Karena agama cenderung dikaitkan dengan moral, maka ketika citra politik bernuansa agama terpenuhi seolah-olah aspek moralitasnya sebagai politisi terjamin. Karena itu, hemat penulis, membangun citra politik dengan balutan agama sangat sering diupayakan untuk mendulang dukungan dari kelompok agama.

Tentu saja, tidak semua umat beragama akan menjadikan citra agama ini sebagai dasar pilihan politiknya. Namun, sasaran politik seperti ini adalah mereka yang menjadikan agama sebagai basis untuk menentukan pilihan politik. Karena itu, agama adalah salah satu intrik politik untuk menarik hati dari mereka ini. Tampaknya, agama juga tidak hanya menyata ketika pesta demokrasi berlangsung. Agama juga tampak dan bahkan sangat menentukan dalam kebijakan-kebijakan politik. Misalnya saja, tahun 2007, ruang publik Indonesia cukup dihebohkan dengan adanya peraturan daerah berbasis syari'ah (perda syari'ah). Tidak sedikit daerah di Indonesia sudah menerapkan perda syari'ah ini, terutama daerah yang bermayoritas Muslim. Contoh lain adalah kebijakan wisata halal. Ini adalah beberapa contoh agama dijadikan dasar dalam kebijakan politik formal.

Realitas panggung politik Indonesia yang kental dengan politisasi agama seperti ini justru menunjukkan sinyal bahaya bagi tubuh bangsa yang berdiri atas beragam keyakinan. Politisasi agama adalah indikasi bahwa kita sedang dikotakkan berdasarkan keyakinan. Sekat-sekat keyakinan dibangun dan bukan tidak mungkin diperbenturkan. Tentu saja, Pancasila yang mengidealkan persatuan dengan semboyan *bhineka tunggal ika*-nya terancam. Terhadap maraknya politisasi agama demikian, kita sepatutnya dihadapkan pada pertanyaan, mengapa agama di Indonesia cenderung bermain pada domain politik.

Menurut penulis, politisasi agama sudah diupayakan dalam proses perumusan dasar negara. Upaya ini tampak dalam perumusan Piagam Jakarta.

Namun, karena terkesan bernuansa agama Islam yang terwujud dalam tujuh kata sila pertama, maka tujuh kata tersebut dihapus dan Piagam Jakarta digantikan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Akibatnya, tidak sedikit orang yang menganggap ini sebagai kekalahan. Karena itu, bentuk-bentuk lanjutan politisasi agama, dalam hal ini agama Islam, diupayakan dalam berbagai cara. Upaya formalisasi agama dalam politik ini adalah suatu bentuk hilangnya batasan antara agama sebagai ruang privat dari politik sebagai ruang publik. Apa tidak bahaya dua wilayah tersebut kehilangan batasannya?

Pandangan politik Hannah Arendt sangat cocok untuk melihat konteks masyarakat Indonesia yang plural. Hannah Arendt mendasarkan konsep politiknya pada fakta pluralitas. Arendt sangat menghargai perbedaan manusia. Baginya, manusia itu tidak sama persis sekaligus tidak berlainan sama sekali. Karena itu, perbedaan manusia mesti diungkapkan dan bukan disisihkan. Ungkapan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk tindakan dan pembicaraan. Melihat fakta pluralitas Indonesia, penulis berpikir bahwa konsep politik Arendt yang mengagungkan pluralitas juga sangat tepat untuk membedah persoalan politisasi agama di Indonesia. Bukan tidak mungkin, politisasi agama juga merupakan suatu pemanfaatan akan pluralitas keyakinan ini.

Tulisan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua, bapak Donatus Hadut dan mama Emilia Jehinut, yang telah mendukung saya dalam pendidikan selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yosef Keladu Koten sebagai pembimbing dalam menyelesaikan tulisan ini. Dr. Yosef Keladu Koten membantu penulis untuk menyempurnakan tulisan ini dalam beberapa kesempatan bimbingan. Saya juga berterima kasih kepada Dr. Bernardus Subang Hayon sebagai penguji dalam sidang skripsi saya. Dr. Bernardus Subang Hayon mempertajam daya kritis dan daya pandang penulis dengan berbagai pertanyaan dan masukan yang diberikan selama ujian. Dengan itu, kapasitas akademik penulis diasah untuk mengakarkan pemahaman penulis berkaitan dengan tulisan ini.

Saya juga berterima kasih kepada Budy-Munawar Rachman, sebagai dosen filsafat Islam STF Driyarkara, yang telah memberikan beberapa referensi yang

saya butuhkan. Beliau juga meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai topik yang saya kaji. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudari Bernadeta Suryani, kakak Krifianus H. Hadut, adik Emilianus S. Hadut, dan adik Septianus H. Hadut, atas dukungannya dalam berbagai cara. Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada semua keluarga saya, bapa Moses Haryanto Fono dan mama Sofia Tuti Ratu, lembaga Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, teman-teman, para sahabat, singkatnya semua yang mendukung saya dengan caranya masing-masing.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak sempurna. Tentu, tulisan ini memiliki kekurangan yang mungkin luput dari perhatian yang tidak sempat dielaborasikan. Karena itu, tulisan ini terbuka terhadap kritikan dan masukan dari pembaca. Kritikan dan masukan dari pembaca akan mempertajam cara pandang penulis. Dengan itu, kritikan dan masukan sangat penulis butuhkan.

Ledalero, 13 April 2025

Penulis

ABSTRAK

Aventinus Darmawan Hadut, 21.75.7011. **POLITISASI AGAMA DAN PENGARUH NEGATIFNYA TERHADAP POLITIK SEBAGAI RUANG ‘DI-ANTARA’ MANUSIA MENURUT HANNAH ARENDT.** Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2025.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas dampak negatif politisasi agama terhadap politik. Menurut penulis, politisasi agama merupakan suatu bentuk aneksasi agama sebagai ruang privat terhadap politik sebagai ruang publik. Hal ini memberikan pengaruh negatif terhadap politik. Tulisan ini ditinjau berdasarkan perspektif politik Hannah Arendt. Politik, bagi Arendt, merupakan ruang ‘di-antara’ manusia yang terbentuk atas tindakan dan pembicaraan manusia secara bersama. Politik ini menekankan beberapa aspek yakni penghargaan terhadap pluralitas manusia, sifat tidak dapat diprediksi, dan kekuasaan. Metode penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif-kualitatif. Penulis mencari berbagai referensi yang bersesuaian dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber tersebut dibaca dan dipilah sesuai dengan poin-poin dari tulisan ini. Hasil pembahasannya menunjukkan bahwa politisasi agama memberikan pengaruh negatif terhadap politik, seperti hilangnya penghargaan akan pluralitas, sifat tidak dapat diprediksi, dan kekuasaan dari politik. Politisasi agama menghilangkan penghargaan pluralitas karena politik mendasarkan kebijakannya pada ajaran agama tertentu. Dengan itu, keberagaman keyakinan akan diabaikan. Politisasi agama juga melenyapkan sifat tidak dapat diprediksi dari politik karena arah dan tujuan politik diatur berdasarkan ajaran agama tertentu. Hal ini berujung pada diskriminasi terhadap mereka yang berbeda.

Kecuali itu, politisasi agama menimbulkan lenyapnya kekuasaan dari politik. Politik sebagai ruang kebersamaan manusia untuk mencapai kesepakatan bersama menjadi hilang karena doktrin agama menutupi ruang perdebatan. Argumentasi rasional tidak dimungkinkan dan yang muncul dalam kebersamaan itu hanyalah kepentingan agama tertentu. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa agama mesti dipisahkan dan dibatasi dari politik. Arendt menyatakan bahwa hilangnya batasan antara ruang privat dengan ruang publik berimplikasi pada pergeseran makna dari kedua ranah tersebut. Kebebasan yang sejatinya melekat pada ruang publik digantikan dengan suatu model penguasaan sebagaimana dalam ruang privat. Karena itu, pemisahan batas ranah privat dengan ranah publik sangat urgen. Dengan pembatasan demikian, politik tidak kehilangan aspek-aspek penting di dalamnya dan agama juga tidak dijadikan instrumen untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Penulis menyimpulkan bahwa politisasi agama memberikan dampak negatif terhadap politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia. Karena itu, agama dan politik mesti dipisahkan satu sama lain agar kedua wilayahnya masing-masing dapat terjaga dengan baik.

Kata kunci: politisasi agama, Islam, pluralisme, politik Hannah Arendt, ruang ‘di-antara’ manusia

ABSTRACT

Aventinus Darmawan Hadut, 21.75.7011. **THE POLITICIZEN OF RELIGION AND ITS NEGATIVE INFLUENCE ON POLITICS AS A SPACE 'IN-BETWEEN' HUMANS ACCORDING TO HANNAH ARENDT.** Thesis. Undergraduate Program, Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2025.

This paper aims to discuss the negative impact of the politicization of religion on politics. According to the author, the politicization of religion is a form of annexation of religion as a private space to politics as a public space. This has a negative influence on politics. This paper is reviewed based on Hannah Arendt's political perspective. Politics, for Arendt, is a space 'in-between' humans that is formed from human actions and conversations together. This politics emphasizes several aspects, namely respect for human plurality, unpredictable nature, and power. The writing method in this scientific work is descriptive-qualitative. The author looks for various references that are relevant to the topic discussed. The sources are read and sorted according to the points of this writing. The results of the discussion show that the politicization of religion has a negative impact on politics, such as the loss of respect for plurality, the unpredictable nature, and the power of politics. The politicization of religion eliminates the respect for plurality because politics bases its policies on the teachings of a particular religion. Therefore, the diversity of beliefs will be ignored. The politicization of religion also eliminates the unpredictable of politics because the direction and goals of politics are regulated based on a particular religion. It will be discrimination to those who are different.

In addition, the politicization of religion causes the loss of power from politics. Politics as a space for human togetherness to reach a common agreement is lost because religious doctrine covers the space for debating. Rational arguments are impossible and what emerges in that togetherness are only the interests of a particular religion. Therefore, the author emphasizes that religion must be separated and limited from politics. Arendt argued that the loss of boundaries between private and public spaces has implications for the shift in meaning of the two realms. The freedom that is inherent in public space is replaced by a model of control as in private space. Therefore, the separation of the boundaries between the private and public realms is very urgent. With such restrictions, politics does not lose important aspects in it and religion is also not used as an instrument to achieve certain political interests. The author concludes that the politicization of religion has a negative impact on politics as a space 'between' humans. Therefore, religion and politics must be separated from each other so that their respective areas can be well maintained.

Keywords: politicization of religion, Islam, pluralism, Hannah Arendt's politics, the space between humans

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Tujuan Penulisan.....	11
1.5 Metodologi Penulisan.....	12
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Politisasi Agama	14
2.1.1 Pengertian Politisasi Agama.....	14
2.1.2 Relasi Agama dan Negara dalam Pemikiran Islam	17
2.1.3 Sekilas Dinamika Perumusan Dasar Negara Indonesia	22
2.1.4 Bentuk-bentuk Politisasi Agama	29
2.1.4.1 Politisasi Berbasis Simbol Agama	29
2.1.4.2 Politisasi Berbasis Narasi Agama.....	32
2.1.4.3 Politisasi Berbasis Identitas Agama	34

2. 2. Hannah Arendt dan Pandangannya tentang Politik.....	36
2.2.1 Pandangan Hannah Arendt Mengenai Tiga Aktivitas Manusia.....	37
2.2.1.1 Kerja (<i>Labor</i>)	37
2.2.1.2 Karya (<i>Work</i>).....	38
2.2.1.3 Tindakan (<i>Action</i>).....	41
2.2.2 Pandangan Arendt Mengenai Dunia Bersama.....	44
2.2.3 Konsep Politik sebagai Ruang ‘di-antara’ Manusia Menurut Hannah Arendt.....	49
2.2.3.1 Politik sebagai Ruang ‘di-antara’ Manusia dan Penghargaan akan Pluralitas Manusia	54
2.2.3.2 Politik sebagai Ruang ‘di-antara’ Manusia dan Sifat Tidak Dapat Diprediksi	56
2.2.3.3 Politik sebagai Ruang ‘di-antara’ Manusia dan Kekuasaan	60
BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN	63
3.1 Politisasi Agama dan Pengaruh Negatif terhadap Politik sebagai Ruang ‘di-antara’ Manusia.....	63
3.1.1 Hilangnya Sifat Tidak Dapat Diprediksi dari Politik sebagai Ruang ‘di-antara’ Manusia.....	63
3.1.2 Lenyapnya Pluralitas Manusia dalam Politik sebagai Ruang ‘di-antara’ Manusia	69
3.1.3 Hilangnya Kekuasaan (<i>Power</i>) dalam Politik sebagai Ruang ‘di-antara’ Manusia	72
3.2 Catatan Kritis: Relasi Agama dan Politik	80
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran.....	90
4.2.1 Pemerintah.....	90
4.2.2 Otoritas Keagamaan	90
4.2.3 Masyarakat	91
4.2.4 Akademisi.....	91

4.2.5 Penulis Selanjutnya	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92